

ANALISIS IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB LINGKUNGAN PERUSAHAAN BERBASIS PSAK No. 57 (Studi Kasus: PT. Holcim Indonesia Tbk., PT. Aneka Tambang Tbk., dan PT. Atlas Resources Tbk)

Intan Marsela¹, Mediaty², Darwis Said³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Akuntansi Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan 10, Makassar
intanmarsela46@gmail.com, mediaty@unhas.ac.id, darwissaid@yahoo.com

Abstrak: Perkembangan bisnis khususnya yang bergerak pada bidang pertambangan pada era saat ini memberikan sebuah dampak negatif yang sangat besar terhadap lingkungan sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standar dan implementasi akuntansi lingkungan di perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan, yaitu PT Holcim Indonesia Tbk., PT Aneka Tambang Tbk., dan PT Atlas Resources Tbk. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang berupa Studi Kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan secara umum telah melaksanakan PSAK khususnya no. 57 terkait dengan provisi yang timbul akibat operasi perusahaan, jumlah provisi tersebut tergantung pada ukuran perusahaan. Dengan penelitian ini dapat menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah bagi perusahaan dalam menjalankan kewajibannya terhadap lingkungan sekitar. Provisi ini timbul karena adanya kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan setelah aktivitas operasi.

Kata Kunci: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Pertanggungjawaban Lingkungan.

Abstract: *The development of businesses, especially those engaged in mining in the current era, has a large negative impact on the surrounding environment. This study aims to analyze the standards and implementation of environmental accounting in companies engaged in mining, namely PT Holcim Indonesia Tbk., PT Aneka Tambang Tbk., And PT Atlas Resources Tbk. This research was conducted using descriptive qualitative data with a research approach in the form of a library study (Library Research). The results showed that the company in general has implemented PSAK, especially no. 57 related to provisions arising from company operations, the amount of these fees depends on the size of the company. With this research, it can be an alternative solution*

to problems for the company in carrying out its obligations to the surrounding environment. This provision arises because of the company's obligation to restore the environment after operating activities.

Keywords: *Statement of Financial Accounting Standards and Environmental Responsibility.*

1 PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya bisnis yang begitu cepat dan penggunaan alat-alat modern. Dibalik bisnis yang cepat dan modern membawa lingkungan sekitar mendapatkan dampak negatifnya. Dalam hal ini perusahaan yang bergerak dalam bisnis pertambangan sangatlah memberikan dampak buruk bagi alam maupun masyarakat sekitar lingkungan bisnis. Maka dari, untuk meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan dari bisnis tersebut, pemerintah mengeluarkan undang-undang agar perusahaan wajib memberikan kontribusi terhadap lingkungan sekitar.

Akuntansi lingkungan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang berfungsi dan mengidentifikasi, mengakui, mengukur, menilai, menyajikan, dan mengungkapkan akuntansi lingkungan. Dalam hal ini, pencemaran dan limbah produksi merupakan salah satu contoh dampak negatif dari operasional perusahaan yang memerlukan sistem akuntansi lingkungan sebagai kontrol terhadap tanggung jawab perusahaan sebab pengolahan limbah yang dilakukan oleh perusahaan memerlukan pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan mengungkapkan biaya pengolahan limbah dari hasil kegiatan operasional perusahaan (Nilasari, 2014). Keberadaan perusahaan dianggap dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat pada umumnya selain dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, perusahaan juga berfungsi sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan. Selain dapat memberikan dampak pada masyarakat, perusahaan juga memiliki dampak pada lingkungan sekitar baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak dilingkungan itu sendiri berupa polusi udara, polusi suara, limbah yang dihasilkan dari proses

produksi atau operasional. Limbah produksi sering kali dihasilkan oleh perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa seperti: (1) Jasa pembantu rumah tangga, (2) Jasa supir, dan (3) Jasa dalam pelayanan-pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit.

Menurut Freeman dan Philips (2002) berdasarkan *Stakeholder Theory*, perusahaan memiliki kewajiban yang bersifat ekonomi (kepada pemegang saham) yaitu kewajiban non-ekonomi kepada pihak lain yang berkepentingan, hal tersebut karena kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan yang diberikan oleh seluruh pemangku kepentingan, tergantung pada bagaimana perusahaan mengelola hubungan dengan pelanggan, karyawan, pemasok, masyarakat, komunitas, pemodal dan lain-lain. Pertanggungjawab social dan lingkungan perusahaan harus mengelola pengeluaran biaya terkait pertanggungjawaban lingkungan, setidaknya pengeluaran biaya tersebut harus mencapai dua aspek yaitu tepat sasaran dan efisien. Tepat sasaran dalam arti biaya yang dikeluarkan memang digunakan untuk pertanggungjawaban lingkungan, efisien dalam arti biaya yang dikeluarkan tidak mempengaruhi laba perusahaan secara signifikan, oleh karena itu pengelolaan biaya terkait dengan pertanggungjawabn lingkungan dapat dilakukan dengan menggunakan akuntansi lingkungan. Dengan akuntansi lingkungan pengeluaran perusahaan dalam rangka perbaikan lingkungan dapat dikelola dengan baik.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bisnis pertambangan dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Maka peneliti bermaksud untuk menganalisis pernyataan standar akuntansi dan pertanggungjawaban lingkungan berbasis PSAK No. 57 pada perusahaan PT Holcim Indonesia Tbk., PT Aneka Tambang Tbk., dan PT Atlas Resources Tbk.

2 KERANGKA TEORI

■ Stakeholder Theory

Menurut Totok (2014), Premis dasar dari teori *stakeholder* adalah bahwa semakin kuat hubungan korporasi, maka akan semakin baik bisnis korporasi. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi maka akan semakin sulit. Hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Teori *stakeholder* adalah sebuah konsep manajemen strategis, tujuannya adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif.

Sedangkan menurut Yunus (2014), Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Gray, Kouhy dan Adams mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholders* sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin *powerful stakeholder*, maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholdernya*.

■ Legitimacy Theory

Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin *legitimate*. Teori legitimasi berhubungan erat dengan teori *stakeholder*. Teori legitimasi bergantung pada premis bahwa terdapat 'kontrak sosial' antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan tersebut beroperasi.

Apabila perusahaan tidak dapat mengimplementasikannya dengan benar, maka sistem tersebut akan menjadi ancaman (Fernando & Lawrence, 2014). Hal ini disebabkan oleh adanya nilai yang bermacam-macam dan perubahan nilai yang terus terjadi, sehingga kemungkinan *conflict of interest* semakin tinggi. Akibatnya, perusahaan mengalami kesulitan didalam pencapaian objektif perusahaan. Hasil yang berbeda akan tercapai ketika perusahaan berhasil mengurangi *gap* yang ada antara perusahaan dan masyarakat (Fernando & Lawrence, 2014).

■ Akuntansi Lingkungan

Dalam himpunan istilah lingkungan untuk manajemen (Solihin, 2009) pengertian akuntansi lingkungan dikemukakan secara rinci bahwa akuntansi lingkungan merupakan proses *accounting* yang mengenali, mencari dan kemudian mengurangi efek-efek lingkungan negatif dari pelaksanaan praktek laporan yang konvensional, mengenali secara terpisah biaya-biaya dan penghasilan yang berhubungan dengan lingkungan dalam sistem laporan yang konvensional, mengambil langkah aktif untuk menyusun inisiatif-inisiatif untuk memperbaiki efek-efek lingkungan yang timbul dari praktek-praktek pelaporan konvensional. Misalnya seperti perusahaan, semua perusahaan pasti menghasilkan limbah. Limbah dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan itu termasuk kategori limbah yang berbahaya. Menurut akuntansi lingkungan mereka harus mengalokasikan dana untuk mengelola limbah tersebut agar tidak membahayakan lingkungan yang ada di sekitarnya.

Tujuan Akuntansi Lingkungan

Menurut Ikhsan (2008) tujuan dan maksud dikembangkannya akuntansi lingkungan yaitu sebagai berikut:

1. Akuntansi lingkungan merupakan alat manajemen lingkungan, sebagai alat manajemen lingkungan. Akuntansi lingkungan digunakan untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi lingkungan. Data akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menentukan

biaya fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya keseluruhan konservasi lingkungan dan juga investasi yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan.

2. Akuntansi lingkungan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat, sebagai alat komunikasi publik, akuntansi lingkungan digunakan untuk menyampaikan dampak negatif lingkungan, kegiatan konservasi lingkungan dan hasilnya kepada publik. Tanggapan dan pandangan masyarakat digunakan sebagai umpan balik untuk mengubah pendekatan perusahaan dalam pelestarian atau pengelolaan lingkungan.

Dasar Hukum Akuntansi Lingkungan di Indonesia

Ada beberapa dasar hukum yang mengatur Akuntansi lingkungan, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam peraturan yang tercantum dalam undang-undang No 32 Tahun 2009 ini menunjukkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Akuntansi Lingkungan yaitu sebagai berikut:

- a) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan (Pasal 6 Ayat 1).
- b) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 6 Ayat 2).
- c) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan (Pasal 16 Ayat 1).
- d) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (Pasal 17 Ayat 1).
- e) Barang siapa yang melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan

pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (Pasal 41 Ayat 1).

- f) Barang siapa yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (Pasal 42 Ayat 1).

2. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam peraturan tentang penanaman modal yang tercantum, menunjukkan beberapa ketentuan UU ini yang berkaitan dengan Akuntansi lingkungan adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 15 menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk:
- b) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
- c) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.
- d) Pasal 16 menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab:
- e) Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- f) Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Pasal 34 Ayat 1 menyatakan bahwa badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- (a) Peringatan tertulis.
- (b) Pembatasan kegiatan usaha.
- (c) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (d) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 33 tahun 2014 tentang akuntansi pertambangan umum. Akuntansi pertambangan umum mengatur perlakuan akuntansi atas:

- (a) Aktifitas pengupasan lapisan tanah.
- (b) Aktifitas pengelolaan lingkungan hidup.

Akuntansi pertambangan umum bertujuan untuk mengontrol akan aktifitas yang di lakukan oleh perusahaan pertambangan, namun tidak ada salahnya jika PSAK No.33 tahun 2014 ini di terapkan di semua perusahaan ataupun instansi yang berpotensi menghasilkan limbah.

3 METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Holcim Indonesia Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, dan PT Atlas Resources Tbk, perusahaan tersebut dijadikan objek penelitian untuk melihat sejauh mana penerapan akuntan lingkungannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan jenis/ pendekatan penelitian yang berupa Studi Kepustakaan (Library Research). Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2003:3).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa jurnal, buku, dan dokumen baik yang berbentuk cetak maupun elektronik serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian.

3.2. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel dan sebagainya (Arikunto, 2010). Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data-data perusahaan

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari laporan tahunan perusahaan yang menjadi objek penelitian.

b. Mengidentifikasi elemen-elemen akuntansi lingkungan dalam laporan tahunan

Identifikasi elemen tersebut meliputi pos-pos laporan keuangan yang berhubungan dengan akuntansi lingkungan yang berupa harta, utang, modal, pendapatan dan beban.

c. Menganalisis penyajian elemen akuntansi lingkungan

Peneliti mencoba mencari tahu bagaimana penyajian elemen tersebut dalam akuntansi lingkungan

d. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan didasarkan pada analisis data yang dilakukan sehingga menggambarkan objek penelitian secara tepat.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Akuntansi Lingkungan di Indonesia

Akuntansi lingkungan merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mengelola transaksi keuangan yang berhubungan dengan lingkungan. Fokus utama akuntansi lingkungan adalah lingkungan, akuntansi lingkungan berusaha untuk mengidentifikasi, mengukur, melaporkan biaya-biaya dan aset terkait lingkungan atau pengelolaan lingkungan. Di Indonesia belum ada standar khusus untuk melaksanakan akuntansi lingkungan, akan tetapi pelaksanaan akuntansi lingkungan saat ini menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Lingkungan (PSAK) yang

diterbitkan IAI. Ada beberapa pernyataan dalam PSAK yang dapat dijadikan standar akuntansi lingkungan, antara lain sebagai berikut:

- 1) PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan. PSAK 1 menyebutkan bahwa laporan mengenai lingkungan hidup dapat disajikan secara terpisah dari laporan keuangan. PSAK No. 1 yang direvisi pada tahun 2009 diadopsi dari IAS 1: *Presentation of Financial Statement*. Menurut PSAK 1 laporan keuangan yang lengkap terdiri dari: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan berisi mengenai kebijakan akuntansi dan penjelasan terkait dengan pos-pos dalam laporan keuangan, laporan posisi keuangan komparatif. PSAK 1 ini dapat dijadikan standar dalam pelaksanaan akuntansi lingkungan berupa pembuatan laporan lingkungan hidup di luar laporan keuangan khususnya untuk industri yang memiliki hubungan erat dengan lingkungan.
- 2) PSAK No. 57 yang diadopsi dari IAS 37: *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*. Menurut PSAK ini perusahaan yang melaksanakan perbaikan lingkungan misal pemulihan lingkungan karena limbah dapat mencatat biaya pemulihan tersebut sebagai provisi. Provisi tersebut diukur dengan estimasi terbaik biaya pemulihan. Provisi diakui sebagai kewajiban atas peristiwa masa lalu, misal pencemaran lingkungan terjadi pada tahun 2011, maka provisi diakui sebagai provisi untuk pemulihan lingkungan atas pencemaran yang terjadi pada tahun 2011. “Peristiwa masa lalu yang menimbulkan kewajiban di masa kini disebut sebagai peristiwa mengikat. Dalam peristiwa mengikat, entitas tidak punya pilihan lain selain menyelesaikan kewajiban tersebut, baik karena dipaksakan oleh hukum, atau merupakan kewajiban konstruktif. Provisi dibedakan dari kewajiban lain karena dalam provisi terdapat ketidakpastian mengenai waktu dan jumlah yang dikeluarkan di masa depan untuk menyelesaikan provisi tersebut” (Sajiarto, 2011)

- 3) Exposure Draft PSAK No. 64 tepatnya paragraf 10 yang merupakan konvergensi dari IFRS 6 *Exploration for and Evaluation of Mineral Resources*. PSAK ini menimbulkan pengakuan terhadap kewajiban akibat dari pemindahan dan restorasi yang terjadi selama periode tertentu sebagai konsekuensi dari eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral.
- 4) PSAK No. 25 membahas mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan. PSAK ini diadopsi dari IAS 8: *Accounting Policies, Changes in Accounting and Errors*. PSAK ini terkait dengan estimasi yang tidak dapat diukur secara tepat. Sajiarto (2011) menyebutkan ada beberapa biaya yang dapat diestimasi terkait dengan pemulihan lingkungan sebagai berikut:
 - a. Provisi biaya pembersihan (*cleanup costs*)
 - b. Provisi rehabilitasi di industri pertambangan
 - c. Provisi klaim atas kontinjensi
 - d. Provisi biaya lingkungan seperti penanggulangan polusi udara, polusi suara, gas dan limbah berbahaya.
 - e. Provisi pembelian peralatan untuk mengendalikan polusi.
- 5) PSAK No. 5 tentang Segmen Operasi, entitas perlu mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan atas aktivitas bisnis yang melibatkan entitas dan lingkungan ekonomi tempat entitas beroperasi. “Adanya segmen operasi yang dilaporkan berdasarkan wilayah geografis atau negara akan menampakkan adanya perbedaan lingkungan peraturan yang bisa saja terkait dengan regulasi di bidang lingkungan hidup. Hal ini sinkron dengan informasi yang disyaratkan oleh GRI yaitu informasi mengenai Negara atau wilayah yang memberikan (i) kontribusi pendapatan minimal 5% dari total pendapatan, (ii) kontribusi beban minimal 5% dari total pendapatan. Dalam PSAK No 5 prosentase yang dianggap

signifikan adalah 10%. PSAK No. 5 ini diadopsi dari IFRS 8: *Operating Segment*” (Sadjiarto, 2011).

Implementasi Akuntansi Lingkungan di Indonesia

Akuntansi lingkungan lebih tepat diterapkan pada perusahaan yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan. Oleh karena itu untuk melihat dan mengamati sejauh mana implementasi akuntansi lingkungan di Indonesia penulis mengambil sample tiga perusahaan yang bergerak dalam bidang industri semen (PT Holcim Indonesia Tbk), Pertambangan (PT Aneka Tambang Tbk) dan batu bara (PT Atlas Resources Tbk.). Berdasarkan telaah terhadap laporan keuangan tahun 2019 masing-masing perusahaan tersebut ditemukan hasil sebagai berikut:

1. PT Holcim Indonesia Tbk.

Berdasarkan laporan keuangan PT Holcim Indonesia Tbk. dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Holcim Indonesia telah melaksanakan akuntansi lingkungan khususnya penerapan PSAK No. 57 tentang provisi, utang kontinjensi dan aset kontinjensi. PT Holcim Indonesia Tbk. melaporkan provisi untuk restorasi kuari sebesar Rp. 43.768.000.000. Dapat disimpulkan bahwa provisi untuk biaya restorasi tanah pertambangan yang diwajibkan secara hukum dan secara konstruktif, berdasarkan estimasi terbaik atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut pada akhir tahun pelaporan.

Tabel 1. Provisi untuk restorasi kuari dalam laporan keuangan PT Holcim Indonesia Tbk tahun 2019

PT SOLUSI BANGUN ONDONESIA Tbk (Dahulu PT HOLCIM INDONESIA Tbk) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI Tanggal-tanggal 31 Maret 2019 (Tidak Diaudit) Dan 31 Desember 2018 (Diaudit) (lanjutan) (Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)		PT SOLUSI BANGUN ONDONESIA Tbk (Formerly PT HOLCIM INDONESIA Tbk) AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITIONS As of March 31, 2019 (Unaudited) and December 31, 2018 (audited) (lanjutan) (Expressed in millions of Rupiah, Unless otherwise stated)		
LIABILITAS JANGKA PANJANG	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31,	31 Desember/ December 31,	NON-CURRENT LIABILITIES

		2019	2018*)	
Liabilitas pajak tangguhan-bersih	30	728.806	708.904	Deferred tax liabilities - net
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun				Long-term loans - net of current maturities
pihak ketiga	21	8.023.181	1.151.801	Third parties
Liabilitas imbalan kerja				Long-term employee benefits
Jangka panjang	33	606.244	552.364	Obligation
Provisi untuk restorasi	22	43.768	47.957	Provision for restoration
Liabilitas jangka panjang lainnya	30	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	Other non-current liabilities
Jumlah Liabilities Jangka Panjang		<u>9.451.999</u>	<u>2.511.062</u>	Total Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas		<u>12.574.555</u>	<u>12.250.837</u>	Total Liabilities

Sumber: Laporan Posisi Keuangan PT Holcim Indonesia Tbk tahun 2019

Berikut ini merupakan pemanfaatan provisi untuk restorasi PT Holcim Indonesia Tbk tahun 2019:

a. Pendidikan

- 1) Beasiswa reguler untuk anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu di area Perseroan sejak 2006. Total penerima beasiswa SBI pada 2019 sebanyak 1.377 siswa.
- 2) Karyawan terlibat dalam kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA). Pada 2019, Perseroan dan karyawan mendukung 2.141 anak melalui program GOTA di wilayah Pabrik Cilacap dan Tuban.
- 3) Program *English For Fun* mengajar mengajar Bahasa Inggris kepada siswa SD hingga SMU dari sekitar pabrik Perseroan. Hingga saat ini, SBI telah bekerja sama dengan 13 sekolah dan 700 peserta serta melatih 2 orang pengajar dari masyarakat lokal.
- 4) *Enterprise-based Vocational Education (EVE)* bagi remaja sekitar wilayah operasional SBI. Total siswa yang berpartisipasi dalam program EVE sejak tahun 2005 adalah 552 orang. Dari total 513 orang yang lulus, sebanyak 237 orang telah

direkrut untuk bekerja di Perseroan, sementara sisanya menemukan peluang kerja di tempat lain.

b. Program Penyuluhan Kesehatan di Pos Pelayanan

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dilakukan secara rutin di Pabrik Narogong, Cilacap, dan Tuban, serta Terminal Lampung difokuskan kepada balita melalui pemberian makan tambahan dan pemeriksaan kesehatan. Tahun ini, Perseroan telah mengembangkan program posyandu khusus untuk remaja dan lansia guna meningkatkan kesehatan masyarakat usia produktif dan lanjut usia. SBI juga melatih 515 kader kesehatan dan staf Posyandu.

c. Inagurasi Koperasi dan Pusat Pengembangan

Kewirausahaan Masyarakat “Dapoer Sampireun” di Kompleks Masjid Albana, Narogong Jawa Barat. Dapoer Sampireun berhasil mendapatkan penghargaan “*Best Community Engagement Program*” dalam ajang *Indonesia Community Engagement Award 2018*. Hingga saat ini, anggota Koperasi Dapoer Sampireun telah mencapai 85 orang dengan omzet Rp80 juta per bulan. Dibentuk sejak 2006, Koperasi BMT Swadaya Pribumi bertujuan untuk membuka akses pembiayaan bagi UMKM di sekitar Pabrik Narogong. Kini anggotanya telah mencapai 7.600 orang dengan aset senilai Rp 20 miliar. Pada 2019, Perseroan memulai proses implementasi program pembiayaan UMKM dengan sistem Syariah di Lamlhom, Kecamatan Lhoknga, Aceh. Ke depannya, program ini ditargetkan mampu memberikan manfaat nyata bagi 110 pelaku UMKM di Lamlhom, Aceh. Dimulai sejak 2012 hingga 2014, Perseroan melakukan pembinaan pembuatan Batik Kutawaru di Cilacap untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di daerah itu. Masyarakat yang terlibat kini berjumlah 20 orang dengan omzet Rp60 juta per bulan. SBI terus melakukan pengembangan program, mulai dari pelatihan tutor batik hingga pusat wisata edukasi batik mangrove.

d. Tempat Tinggal/Infrastruktur

Pada tahun 2019, dukungan Perseroan untuk tempat tinggal dan infrastruktur public diwujudkan dengan membangun jalan Desa Klapanunggal Narogong, Tritih Lor Cilacap, pembuatan MCK Umum Kutawaru Cilacap, pembangunan Gapura Jalan Mekarwangi Tritih Lor Cilacap, pemasangan paving blok untuk jalan desa, dan pembangunan masjid di Lhoknga, Aceh. Pembangunan infrastruktur juga diwujudkan dengan mendukung Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang rutin dilakukan setiap tahunnya.

e. Informasi Produk dan Jasa

Penanggulangan Pengaduan Pelanggan Perseroan sepenuhnya mengikuti peraturan dan standar yang ditetapkan pemerintah (SNI) tentang informasi dan label produk. Untuk menjaga kesetiaan pelanggan, Perseroan menjalankan berbagai program pelayanan dan apresiasi pelanggan yang meliputi penyampaian informasi dan penanganan keluhan pelanggan. Pelanggan dapat menghubungi Perseroan secara langsung melalui sejumlah media komunikasi: Selain itu, situs web serta sejumlah layanan portal digital Perseroan juga berfungsi sebagai sarana komunikasi informasi pemasaran produk dan/atau jasa yang dimiliki Perseroan, sekaligus sarana pengelolaan pengaduan dan masukan dari pelanggan dan para pemangku kepentingan.

2. PT Aneka Tambang Tbk.

Berdasarkan laporan keuangan PT Aneka Tambang Tbk. dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) PT Aneka Tambang Tbk telah melaksanakan akuntansi lingkungan khususnya penerapan PSAK No. 57 tentang provisi, utang kontinjensi dan aset kontinjensi. PT Aneka Tambang Tbk melaporkan provisi sebesar Rp. 31.190.755. Provisi diakui apabila Grup mempunyai kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif)

sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan kewajiban tersebut dapat diestimasi dengan andal, Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

Tabel 2. Provisi atas pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup dalam laporan keuangan PT Aneka Tambang

Tbk tahun 2019

PT ANEKA TAMBANG TBK DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES					
Lampiran 1 / 2 Schedule					
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2019, 31 DESEMBER 2018 DAN 1 JANUARI 2018 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)					CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 31 DECEMBER 2019, 31 DECEMBER 2018 AND 1 JANUARY 2018 (Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018*	1 Januari/ January 2018*	
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha	16				Trade payables
- Pihak Ketiga		642.785.413	403.931.604	244.818.853	Third parties -
- Pihak berelasi		96.958.283	463.814.512	80.060.002	Related parties -
Beban akrual	17	441.970.183	784.615.861	380.307.068	Accrued expenses
Liabilitas imbalan karyawan jangka pendek		74.914.550	118.518.440	27.736.785	Short-term employee benefit liabilities
Uang muka pelanggan		199.145.890	317.082.067	115.294.680	Advances from customers
Liabilitas derivative		10.041.652	2.620.644	-	Derivative liability
Utang pajak	18b				Taxes payable
- Pajak penghasilan badan		18.412.722	8.405.083	162.486	Corporate income taxes -
- Pajak lain-lain		77.857.424	146.082.982	36.106.464	Other taxes -
Pinjaman bank jangka pendek	19	1.408.101.000	1.452.000.000	2.715.620.000	Short-term bank loan
Utang obligasi yang jatuh tempo dalam satu tahun	20	-	-	899.594.174	Current maturities of bonds payable
Pinjaman investasi yang jatuh tempo dalam satu tahun	21	1.585.286.186	1.121.605.386	486.103.998	Current maturities of investment loans

Provisi atas pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup yang jatuh tempo dalam satu tahun	22	31.190.755	25.166.415	21.650.895	Current maturities of provision for environmental and reclamation costs
Utang lain-lain	25	<u>706.574.335</u>	<u>718.088.480</u>	<u>541.160.687</u>	Other Payable
Jumlah liabilitas jangka pendek		<u>5.293.238.393</u>	<u>5.561.931.474</u>	<u>5.548.616.092</u>	Total current liabilities

Sumber: Laporan Posisi Keuangan PT Aneka Tambang Tbk. tahun 2019

Selain mengelola dampak lingkungan dalam kegiatan operasional, ANTAM juga melaksanakan berbagai inisiatif pelestarian lingkungan hidup yang tidak terkait langsung dengan operasional perusahaan, termasuk yang dilakukan di luar wilayah operasi Perusahaan. ANTAM aktif berkontribusi pada pemeliharaan kualitas lingkungan hidup melalui kegiatan penanaman pohon, selain yang dilakukan sebagai bagian dari aktivitas reklamasi lahan dan manajemen pascatambang. Sepanjang 2019, ANTAM telah menanam 1,2 juta pohon yang ditanam di lahan bekas tambang dan di luar bekas tambang. ANTAM juga terlibat dalam proyek rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Poleang di areal seluas 285 ha di Sulawesi Tenggara, dengan menanam total 313.500 pohon.

Sedangkan untuk pelestarian lingkungan di wilayah operasi, ANTAM telah melakukan reklamasi lahan secara progresif sesuai dengan Rencana Reklamasi T dan Rencana Reklamasi 5 (lima) tahunan. Menyadari bahwa keanekaragaman hayati yang terpelihara dengan baik adalah warisan yang sangat penting bagi generasi mendatang, ANTAM juga mendukung upaya-upaya pelestarian sejumlah satwa asli Indonesia yang berstatus satwa langka atau bahkan terancam punah. Pada tahun 2019, ANTAM terlibat antara lain dalam program konservasi populasi Jalak Putih, penangkaran Ikan Napoleon, dan penetasan telur Komodo.

Selain itu, ANTAM juga menyediakan dukungan bagi program Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Bogor agar dapat berlangsung secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat nyata berupa peningkatan kualitas udara maupun dampak ekonomi masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan jual beli, promosi usaha dan kampanye lingkungan hidup.

3. PT Atlas Resources Tbk.

Berdasarkan laporan keuangan PT Atlas Resources Tbk (“Perseroan”) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. PT Atlas Resources Tbk (“Perseroan”) telah melaksanakan akuntansi lingkungan khususnya penerapan PSAK No. 57 tentang provisi, utang kontinjensi dan aset kontinjensi. PT Atlas Resources Tbk (“Perseroan”) melaporkan provisi sebesar Rp. 1.324.000.000. Dapat disimpulkan bahwa PT Atlas Resources Tbk ini telah mengakui kewajiban sebagai liabilitas pada liabilitas konstruktif yang berasal dari aktivitas yang telah dilaksanakan dengan pengukuran pada saat dan setelah pengakuan sebesar nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak. Perubahan pada pengukuran kewajiban yang timbul selama tahap produksi juga dibebankan ke beban pokok pendapatan, sementara peningkatan kewajiban yang sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai biaya keuangan.

Tabel 3. Provisi dalam laporan keuangan PT Atlas Resources Tbk tahun 2019

PT ATLAS RESOURCES Tbk DAN ENTITAS ANAK Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 (Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)	30 September/September 30,2019 (Tidak Diaudit/Unaudit)	Catatan/ Notes	31 Desember/De cember 31 2018	PT ATLAS RESOURCES Tbk AND SUBSIDIARIES Consolidated Statements of Financial Position September 30, 2019 and December 31, 2018 (Expressed in Thousands United States Dollar, unless Otherwise Stated)
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NONCURRENT LIABILITIES
Utang lain-lain	20.923	16	21.47	Other accounts payable
Liabilitas pajak tangguhan	5.158	28d	5.018	Deferred tax liabilities
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun :				Long-term liabilities - net of current portion
Pinjaman jangka panjang	56.367	17b	76.775	Long-term loans
Liabilitas sewa pembiayaan	95	19	92	Lease liabilities
Cadangan reklamasi dan penutupan tambang	1.324		3.263	Provision for reclamation and mine closure
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	<u>1.656</u>	27	<u>1.447</u>	Long-term employee benefit liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>85.523</u>		108.065	Total Noncurrent Liabilities

Jumlah Liabilitas

327.071

340.079 Total Liabilities

Sumber: Laporan Posisi Keuangan PT Atlas Resources Tbk. tahun 2019

Berikut ini merupakan pemanfaatan provisi untuk restorasi PT Atlas Resource Tbk tahun 2019:

a. Keagamaan

Sebagai bentuk kepedulian, Perseroan mendukung kegiatan keagamaan di lingkungan tambang, diantaranya:

- 1) Bantuan pendanaan pembangunan sarana ibadah masyarakat, Masjid Al Amin.
- 2) Bantuan Qurban sapi untuk masyarakat di sekitar tambang PT GPU.

b. Pendidikan

Perseroan kembali menyalurkan dana bantuan pendidikan secara berkelanjutan kepada siswa yang tinggal di wilayah sekitar tambang GPU. Bantuan pendidikan ini diberikan kepada 10 orang siswa, mulai dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi. Perseroan juga mendukung peningkatan keterampilan secara nyata bagi mahasiswa bidang pertambangan dengan menyalurkan dana bantuan akomodasi dan transportasi untuk 7 orang mahasiswa yang melakukan Praktek kerja Lapangan (PKL) dan Penyelesaian Skripsi.

c. Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan

Perseroan mendukung kegiatan-kegiatan sosial, budaya dan kemasyarakatan terutama dalam rangka pengembangan dan pembinaan masyarakat di sekitar wilayah operasional tambang Perseroan, diantaranya:

- 1) Donasi untuk kegiatan hari kemerdekaan RI 2019.
- 2) Bantuan untuk kegiatan instansi pemerintah dalam rangka penyuluhan ke masyarakat, termasuk bantuan bahan bakar minyak untuk transportasi Kepala Desa, Camat, Polisi dan TNI.
- 3) Bantuan Sepatu safety untuk Komando Rayon Militer (Koramil) Rawas Ilir.

- 4) Bantuan peresmian dan dukungan kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Bumi Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Muratara.
- 5) Dukungan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kecamatan Rawas Ilir.
- 6) Donasi Kegiatan Hari Lingkungan Hidup Kabupaten Muratara 2019.

d. Pemuda dan Olahraga

Perseroan mendukung kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan (OKP), organisasi mahasiswa dan kegiatan olahraga. Dukungan yang diberikan diantaranya:

- 1) Bantuan kendaraan dan konsumsi untuk kegiatan Jambore Pramuka se-Kabupaten Musi Rawas Utara di Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara.
- 2) Bantuan Donasi untuk kegiatan Organisasi Pemuda Pancasila Kecamatan Rawas Ilir.
- 3) Donasi untuk kegiatan Latihan Kepemimpinan Siswa Kabupaten Muratara tahun 2019.

e. Kesehatan

Perseroan melalui GPU melayani masyarakat setempat untuk mendapatkan pengobatan gratis di klinik Perusahaan, penyediaan ambulans gratis milik perusahaan yang dapat dipergunakan dalam kondisi darurat serta pengobatan massal gratis di Dusun IV Desa Beringin Makmur II yang bekerjasama dengan Puskesmas setempat. Selain itu, Perseroan juga menyalurkan dana kepada Dinas kesehatan Kabupaten Muratara dalam rangka mendukung kegiatan Hari Kesehatan Nasional.

f. Lingkungan

Di bidang lingkungan, Perseroan melanjutkan dan memperluas cakupan program CSR yang telah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya yakni penghijauan di wilayah desa yang terletak di sekitar SBL. Penghijauan yang dilakukan berada di daerah dusun 1 dan dusun 3 desa Pulai Gading. Wilayah desa yang dicakup program penghijauan cukup luas, dan karena terbatasnya

kapasitas nursery yang dimiliki Perseroan, maka program ini dilakukan secara bertahap sampai seluruh wilayah desa yang gundul terkena erosi air hujan dapat tercakupi seluruhnya. Perseroan juga melaksanakan pengembangan kelompok tani dalam membudidayakan kayu produktif. Masyarakat diberikan penyuluhan mulai dari menanam, merawat hingga menuai manfaat ekonominya. Lebih jauh, Perseroan juga memfasilitasi pembentukan koperasi unit desa dalam rangka membantu masyarakat untuk memasarkan hasil usaha tersebut.

5 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa PT Holcim Indonesia Tbk., PT Aneka Tambang Tbk., dan PT Atlas Resources Tbk telah menerapkan akuntansi lingkungan khususnya PSAK no. No. 57 tentang provisi, utang kontinjensi dan aset kontinjensi dibuktikan dengan adanya provisi terkait dengan pemulihan kondisi lingkungan. Provisi ini timbul karena adanya kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan setelah aktivitas operasi. Adapun pemanfaatan provisi untuk restorasi PT Holcim Indonesia Tbk tahun 2019 yaitu pendidikan, program penyuluhan kesehatan di posyandu, inagurasi koperasi dan pusat pengembangan, tempat tinggal/infrastruktur, dan informasi produk dan jasa. Sedangkan pada tahun 2019 ANTAM terlibat antara lain dalam program konservasi populasi Jalak Putih, penangkaran Ikan Napoleon, dan penetasan telur Komodo dan ANTAM juga menyediakan dukungan bagi program Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Bogor agar dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dan terakhir pemanfaatan provisi untuk restorasi PT Atlas Resource Tbk tahun 2019 yaitu keagamaan, pendidikan, social budaya dan kemasyarakatan, pemuda dan olahraga, kesehatan, dan lingkungan.

6 SARAN

Mengingat belum ada standar yang khusus mengatur akuntansi lingkungan, diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengusulkan desain mengenai standar dan praktek akuntansi lingkungan.

7 DAFTAR PUSTAKA

Annual Report. (2019). PT. Aneka Tambang Tbk

Annual Report. (2019). PT. Atlas Resources Tbk

Annual Report. (2019). PT. Holcim Indonesia Tbk

Arikunto, G. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Fernando, S., & Lawrence, S. (2014). A theoretical framework for CSR practices: integrating legitimacy theory, stakeholder theory and institutional theory. *Journal of Theoretical Accounting Research*, 10(1), 149-178.

Freeman, R, E & Philips, R, A. 2002. *Stakeholder Theory : A Libertarian Defense Business Ethics Quarterly*, vol.12, no.3, hh 331-349

Gray, R., Kouhy, R., and Lavers, S. 1995a, “*Corporate Social and environmental reporting: a review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure*”, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 8 No. 2, pp. 47-77.

Ikhsan, A. (2008). *Akuntansi lingkungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Nilasari, Fitri. (2014). *Analisis penerapan akuntansi lingkungan terhadap pengelolaan limbah*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Sadjiarto, Ardja, 2011, *Pelaporan Aktivitas Lingkungan Dan Akuntansi Lingkungan, dokumen dipresentasikan di Seminar Lingkungan Hidup*.

Solihin, I. (2009). *Corporates Social responsibility, from charity to sustainability*. Jakarta ; Salemba Empat.

Totok, Mardikanto. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*. Alfabeta. Bandung.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Widarto, D., & Mudjiyanti, R. (2015). *Pengaruh environmental performance dan environmental disclosure terhadap economic performance*. *MEDIA EKONOMI*, 15(2).

Yunus Handoko, “Implementasi Social and Environmental Disclosure dalam Perspektif Teoritis” *Jurnal JIBEKA*, Vol.8 No.2, 2014, hlm.74

Zed, Mestika. 2003. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia